



Optimalisasi Kinerja Manajemen Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire

Alden Karurukan¹, Petrus Peleng Roreng², Sita Y. Sabandar³

¹)Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 08-07-2025 | Review 15-07-2025 | Revision 24-07-2025 | Accepted 30-07-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, hambatan, dan strategi optimalisasi kinerja Bagian Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Bagian ini memegang peran strategis dalam pengelolaan arsip dan publikasi produk hukum daerah, mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan kunci yang terlibat langsung dalam manajemen dan teknis dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan proses dokumentasi masih mengandalkan metode manual dan semi-digital, dengan hambatan utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya koordinasi antarperangkat daerah, dan keterbatasan anggaran. Strategi yang diusulkan meliputi penyusunan SOP internal, pengembangan sistem informasi hukum berbasis web, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran khusus, dan inovasi publikasi hukum seperti e-bulletin serta katalog regulasi. Implementasi strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterjangkauan informasi hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kata kunci: dokumentasi hukum, kinerja manajemen, optimalisasi, pemerintah daerah, Nabire

Abstract: This study aims to analyze the role, challenges, and optimization strategies of the Legal Documentation Division at the Regional Secretariat of Nabire Regency. The division plays a strategic role in managing archives and publishing regional legal products, thereby supporting transparency, accountability, and the effectiveness of local governance. A qualitative descriptive method was employed, utilizing in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving four key informants directly engaged in legal documentation management and technical operations. The findings reveal that documentation processes still rely on manual and semi-digital methods, with key obstacles including limited human resources, insufficient utilization of information technology, weak interdepartmental coordination, and budget constraints. Proposed strategies include establishing internal Standard Operating Procedures (SOPs), developing a web-based legal information system, enhancing staff capacity through training, strengthening cross-sectoral coordination, allocating dedicated budgets, and introducing innovative publication tools such as e-bulletins and regulatory catalogues. Implementing these strategies is expected to improve efficiency, accuracy, and public accessibility of legal information, thereby enhancing the performance of the Legal Documentation Division and contributing to better governance at the regional level.

Keywords: legal documentation, management performance, optimization, local government, Nabire

¹E-mail: amkarurukan@gmail.com

²E-mail: petrusroreng1@gmail.com

³E-mail: tikupasansita@gmail.com

Pendahuluan

Good governance menuntut tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan efektif, yang salah satunya diwujudkan melalui dokumentasi produk hukum daerah yang tertib dan mudah diakses (UNDP, 1997; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia [Kemendagri], 2018). Bagian Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nabire memiliki peran strategis dalam mengelola arsip, mendistribusikan, dan mempublikasikan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta keputusan kepala daerah. Namun, dalam praktiknya, kinerja bagian ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, hingga lemahnya koordinasi antarperangkat daerah (Mulianto, komunikasi pribadi, 2025).

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keterbukaan informasi publik. Data hasil observasi dan wawancara di Bagian Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Nabire menunjukkan beberapa kendala utama, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Fenomena dan Fakta Pendukung Permasalahan Dokumentasi Hukum di Kabupaten Nabire

No	Fenomena Permasalahan	Fakta Lapangan
1	Produk hukum daerah sulit diakses publik	Website JDIH daerah belum aktif; publikasi masih mengandalkan papan pengumuman dan salinan fisik
2	Proses dokumentasi belum terdigitalisasi secara penuh	Arsip sebagian besar masih berbentuk hard copy; digitalisasi baru dilakukan secara parsial
3	Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang dokumentasi hukum dan TI	Hanya sebagian staf memiliki pelatihan pengelolaan arsip digital; belum ada sertifikasi kompetensi
4	Koordinasi lintas perangkat daerah lemah	Beberapa OPD terlambat mengirimkan salinan peraturan yang telah disahkan
5	Dukungan anggaran dan fasilitas teknologi masih terbatas	Tidak ada server khusus arsip hukum; peralatan seperti scanner dan komputer masih minim

Sumber: Data primer penelitian (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, 2025).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mewajibkan dokumentasi hukum tertib—sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, **Permendagri Nomor 80 Tahun 2015** jo. **Permendagri Nomor 120 Tahun 2018**—dengan praktik yang berlangsung di lapangan (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia [Kemenkumham], 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem dokumentasi hukum daerah yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi untuk mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintahan. Di Kabupaten Nabire, lemahnya tata kelola dokumentasi hukum berpotensi menghambat pelayanan publik, memperlambat akses informasi regulasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan menganalisis hambatan dan merumuskan strategi optimalisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi reformasi birokrasi hukum daerah, sekaligus menjadi model yang dapat diadaptasi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Utama yang Mendukung Penelitian

a. Teori Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja adalah proses berkesinambungan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu maupun organisasi, dengan menyelaraskannya pada tujuan strategis (Aguinis, 2019). Dalam konteks sektor publik, manajemen kinerja mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi untuk memastikan pelayanan yang efektif dan efisien (Moynihan et al., 2017).

Penerapan manajemen kinerja di Bagian Dokumentasi Hukum berfokus pada pengelolaan sumber daya, proses dokumentasi, serta hasil yang mendukung transparansi hukum daerah.

b. Teori Good Governance

Konsep *good governance* menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik (United Nations Development Programme [UNDP], 1997). Dalam pengelolaan dokumentasi hukum daerah, prinsip ini mengharuskan informasi hukum dapat diakses publik secara mudah, akurat, dan tepat waktu (OECD, 2021).

c. Digital Governance dan E-Government

Transformasi digital di pemerintahan (*digital governance*) memungkinkan proses birokrasi menjadi lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi (Gil-García et al., 2018). Dalam konteks dokumentasi hukum, *e-government* mendukung publikasi daring produk hukum, penyimpanan arsip digital, dan akses publik melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (Pratama & Putra, 2021).

Definisi Operasional Konsep Kunci

- **Kinerja Manajemen:** tingkat efektivitas dan efisiensi Bagian Dokumentasi Hukum dalam mengelola arsip, publikasi, dan koordinasi produk hukum daerah.
- **Dokumentasi Hukum:** proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran produk hukum daerah dalam bentuk fisik maupun digital (Kemenkumham, 2019).
- **Optimalisasi:** serangkaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
- **Good Governance:** tata kelola pemerintahan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik (OECD, 2021).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa studi terkait optimalisasi kinerja di sektor publik menunjukkan relevansi dengan penelitian ini (Tabel 2).

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Konteks Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
Voltri et al. (2023)	Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat	Peningkatan kinerja memerlukan manajemen berbasis kompetensi dan profesionalisme ASN	Pentingnya penguatan SDM untuk mendukung fungsi strategis
Hazh	Tata kelola birokrasi di	Strategi dokumentasi dan	Menunjukkan pentingnya

Peneliti & Tahun	Konteks Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Ini
(2024)	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	kolaborasi antar pemangku kepentingan meningkatkan akuntabilitas	koordinasi lintas lembaga
Pratama & Putra (2021)	Implementasi JDIH di Kabupaten Banyuwangi	Digitalisasi dokumentasi hukum meningkatkan akses publik dan efisiensi kerja	Menguatkan argumen perlunya digitalisasi dokumentasi hukum
Yamin et al. (2019)	E-Government di Pemerintah Kota Makassar	Keberhasilan digitalisasi bergantung pada infrastruktur, SDM, dan dukungan kebijakan	Relevan dengan kebutuhan integrasi teknologi di Nabire
Hamzah et al. (2022)	Layanan ASN pascabencana di Provinsi Sulawesi Barat	Pemanfaatan teknologi dan SOP jelas meningkatkan efektivitas pelayanan publik	Mendukung pentingnya SOP dan pemanfaatan TI di dokumentasi hukum

Sumber: Diadaptasi dari penelitian terdahulu (2025)

Analisis Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Literatur sebelumnya telah membahas optimalisasi kinerja birokrasi, implementasi JDIH, dan digitalisasi layanan publik di berbagai daerah. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kinerja Bagian Dokumentasi Hukum di pemerintah daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur terbatas seperti Kabupaten Nabire. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek teknologi atau manajemen saja, sedangkan studi ini menggabungkan analisis peran, hambatan, dan strategi optimalisasi dengan mempertimbangkan faktor SDM, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran sebagai satu kesatuan strategi perbaikan.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan memberikan perspektif komprehensif terkait optimalisasi dokumentasi hukum daerah di wilayah dengan keterbatasan sumber daya, sekaligus menawarkan model strategi yang dapat direplikasi oleh daerah serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain **deskriptif kualitatif** dengan pendekatan studi kasus. Desain ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran, hambatan, dan strategi optimalisasi kinerja Bagian Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan holistik melalui interaksi langsung dengan informan dan lingkungan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dokumentasi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Dari populasi tersebut, peneliti menggunakan teknik **purposive sampling** untuk menentukan informan kunci yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses dokumentasi hukum. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam (Etikan et al., 2016). Sampel penelitian terdiri dari empat informan kunci, yaitu Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, dan staf teknis bagian hukum.

Lokasi penelitian berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang dipilih secara sengaja karena relevansi langsungnya dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu informan dan kelancaran akses terhadap dokumen yang dibutuhkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: **wawancara mendalam** (*in-depth interview*), **observasi langsung**, dan **studi dokumentasi**. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi topik yang lebih luas sesuai respons informan (Moleong, 2021). Observasi digunakan untuk mencatat proses kerja, interaksi, dan penggunaan teknologi di Bagian Dokumentasi Hukum, sedangkan studi dokumentasi memanfaatkan arsip, laporan kegiatan, dan regulasi terkait untuk memperkuat temuan lapangan. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data (Denzin, 2017).

Analisis data dilakukan secara **induktif** mengikuti model analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan penarikan pola dan hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian untuk memastikan konsistensi dan akurasi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan empat informan kunci yang dipilih secara purposif karena memiliki peran strategis dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dokumentasi hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Karakteristik mereka disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden Penelitian

Kode Informan	Jabatan	Lama Bekerja	Latar Belakang Pendidikan
I1	Kepala Bagian Hukum	15 tahun	Sarjana Hukum
I2	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum	12 tahun	Sarjana Hukum
I3	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	10 tahun	Sarjana Teknik
I4	Staf Bagian Hukum	8 tahun	Sarjana Hukum

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keempat informan memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur, hambatan, dan kebutuhan pengembangan dokumentasi hukum. Misalnya, I1 menegaskan, "*Peran kami belum maksimal karena keterbatasan SDM dan belum adanya sistem digital yang terintegrasi*" (Wawancara, 14 Juni 2025).

Pernyataan ini dikuatkan oleh I2 yang menyebutkan, "*Proses dokumentasi masih manual dan semi-digital, publikasi belum konsisten secara online*" (Wawancara, 14 Juni 2025).

Hasil Penelitian

1. Peran Bagian Dokumentasi Hukum

Bagian Dokumentasi Hukum berfungsi mengelola arsip dan publikasi seluruh produk hukum daerah. Aktivitas meliputi penerimaan dokumen, pencatatan, pengarsipan fisik dan digital, hingga pendistribusian kepada publik dan perangkat daerah. Namun, peran ini masih terbatas karena keterlibatan pada tahap penyusunan produk hukum hanya bersifat administratif, tanpa kontribusi pada substansi peraturan.

2. Faktor Penghambat

Tiga hambatan utama ditemukan:

- i. **Keterbatasan SDM** – baik jumlah maupun kompetensi teknis digitalisasi arsip.
- ii. **Kurangnya dukungan teknologi dan infrastruktur** – tidak adanya server khusus, scanner memadai, dan aplikasi JDIH lokal yang aktif.
- iii. **Lemahnya koordinasi antarperangkat daerah** – keterlambatan pengiriman dokumen dari OPD menyebabkan arsip tidak lengkap dan publikasi tertunda.

3. Strategi Optimalisasi

Informan mengusulkan strategi sebagai berikut:

- Penyusunan SOP internal alur dokumentasi hukum untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
- Pengembangan sistem informasi hukum berbasis web terintegrasi (JDIH daerah).
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen arsip digital dan legal drafting.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dengan OPD dan Dinas Kominfo.
- Dukungan anggaran khusus untuk fasilitas teknologi.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dokumentasi hukum di Nabire belum optimal karena kombinasi faktor internal (SDM, teknologi) dan eksternal (koordinasi lintas sektor). Kondisi ini sejalan dengan temuan Pratama dan Putra (2021) yang menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi dokumentasi hukum sangat bergantung pada kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi.

Keterbatasan SDM di Nabire bukan hanya terkait kuantitas, tetapi juga kualitas kompetensi teknis. Hal ini konsisten dengan studi Voltri et al. (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kinerja birokrasi memerlukan manajemen berbasis kompetensi dan penguatan profesionalisme aparatur. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-OPD yang ditemukan pada penelitian ini juga sejalan dengan hasil Hazh (2024), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencegah fragmentasi data hukum.

Novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap dokumentasi hukum di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi seperti Nabire. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas JDIH di wilayah yang relatif maju secara digital, sementara studi ini menunjukkan bahwa strategi optimalisasi di daerah tertinggal harus mengintegrasikan pelatihan SDM, pengadaan teknologi, dan penguatan jejaring koordinasi sebagai paket kebijakan yang utuh.

Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Nabire dalam merancang kebijakan peningkatan kinerja dokumentasi hukum melalui pengadaan fasilitas teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, dan penguatan SOP internal. Implementasi strategi ini berpotensi mempercepat proses dokumentasi, meningkatkan akses publik terhadap informasi hukum, dan memperkuat transparansi pemerintahan.

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori manajemen kinerja (Aguinis, 2019) dan *digital governance* (Gil-García et al., 2018) ke konteks daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Temuan ini menegaskan bahwa faktor koordinasi lintas sektor harus dipandang sebagai komponen integral dalam model optimalisasi kinerja dokumentasi hukum di sektor publik, bukan sekadar variabel pendukung.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, hambatan, dan strategi optimalisasi kinerja Bagian Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bagian ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan arsip dan publikasi produk hukum daerah, kinerjanya belum optimal karena kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, dan terbatasnya dukungan anggaran.

Strategi optimalisasi yang dirumuskan meliputi penyusunan SOP internal, pengembangan sistem informasi hukum berbasis web, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan anggaran khusus, serta inovasi publikasi hukum. Strategi ini selaras dengan prinsip *good governance* dan *digital governance*, serta menjawab tujuan penelitian untuk menemukan solusi yang implementatif dan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya langkah konkret pemerintah daerah untuk mengintegrasikan penguatan SDM, teknologi, dan koordinasi lintas sektor sebagai satu kesatuan kebijakan. Implementasi yang tepat akan mempercepat proses dokumentasi, meningkatkan keterbukaan informasi hukum, dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Implikasi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan model manajemen kinerja di sektor publik dengan memasukkan koordinasi lintas sektor sebagai variabel kunci, khususnya pada konteks daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini juga memperluas penerapan teori manajemen kinerja dan *digital governance* pada konteks wilayah tertinggal, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi dalam literatur.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif sedikit dan lokasi penelitian yang hanya terfokus pada satu kabupaten, sehingga generalisasi temuan ke konteks daerah lain memerlukan kehati-hatian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari berbagai tingkatan pemerintahan dan membandingkan beberapa daerah dengan kondisi infrastruktur berbeda. Selain itu, kajian lanjutan dapat mengukur efektivitas implementasi strategi optimalisasi melalui pendekatan *mixed methods* untuk

memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H. (2019). *Performance management for dummies*. Wiley.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Gil-García, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, 20(5), 633–646. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1327181>
- Halik, J. B., Lintang, J., & Patandean, E. H. B. (2024). The role of employee productivity through digitalization in increasing the performance of culinary SMEs. *Brazilian Journal of Development*, 10(2). <https://doi.org/10.34117/bjdv10n2-047>
- Hamzah, H., Yusuf, M., & Said, M. (2022). Optimalisasi pelayanan aparatur sipil negara pasca gempa bumi: Studi kasus pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 91–98.
- Hazh, A. S. (2024). Optimalisasi tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. *Community Empowerment: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 59–64.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. Jakarta: Kemenkumham.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lambe, K. H. P., Tandi, A., & Pangalo, T. (2023). ANALYSIS OF EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF NORTH TORAJA REGENCY. *Journal of Entrepreneur Business and Management (JEBM)*, 1(3), 87–98. <https://journal.amkop.id/jebm/article/view/111>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moynihan, D. P., Pandey, S. K., & Wright, B. E. (2017). Setting the table: How transformational leadership fosters performance information use. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 143–164. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur024>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>

- Pratama, A., & Putra, A. E. (2021). Pemanfaatan JDIIH dalam menunjang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 11(2), 45–58.
- Roreng, P. P., Bandhaso, M., & Tandirerung, C. J. (2021). Competency Analysis of Human Resources and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Reports in the Local Government of the City of Makassar. *WSEAS Transactions on BUSINESS and ECONOMICS*, 18(113), 1218–1222. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.113>
- Roreng, P. P., Halik, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic Literature Review : Kondisi Makroekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 56–67. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.306>
- Sabandar, S., Tangdialla, R., & Tangdialla, L. (2022). Accountability And Transparency in The Industrial Revolution 4.0 Era at Private Universities in Makassar. *Proceedings of the 1st Warmadewa International Conference on Science, Technology and Humanity, WICSTH 2021, 2012*. <https://doi.org/10.4108/eai.7-9-2021.2318248>
- Sabandar, S. Y., Tawe, A., & Musa, C. I. (2018). The implementation of Good University Governance in the Private Universities in Makassar (Indonesia). *Espacios*, 39(2).
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Susanti, R., Lambe, K. H. P., & Gunadi, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Yayasan Kristen Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 47–55. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.301>
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. UNDP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Voltri, F., Harianto, H., & Mulatsih, S. (2023). Strategi optimalisasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam meningkatkan kinerja pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 11(1), 10–17.
- Wulandari, Sabandar, S. Y., & Patiung, N. (2024). Pengaruh Motivasi Kerja , Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asri Tritunggal Property. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.311>
- Yamin, M., Sari, D. P., & Nurhayati, S. (2019). E-Government dan reformasi birokrasi di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 102–114.